

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada di bagian utara Jawa Tengah. Kota ini telah berdiri sejak tanggal 5 Mei 1547 dan menempati posisi sebagai kota metropolitan terbesar keenam di negara ini, berada di bawah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Luas wilayahnya mencapai 373,7 kilometer persegi atau sekitar 37.369,568 hektar. Secara geografis, Kota Semarang terletak pada koordinat 6°50'-7°10' Lintang Selatan dan 109°35'-110°50' Bujur Timur. Kota Semarang mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Bagian Utara : Wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang
- Bagian Timur : Terdapat dua kabupaten yang berbatasan yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Bagian Barat : Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal

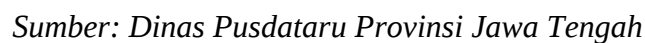
Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota ini terdiri dari berbagai kecamatan, di antaranya Gunungpati, Tugu, Gayamsari, Mijen, Ngaliyan, Tembalang, Banyumanik, Candisari, Genuk, Gajah Mungkur, Pedurungan, serta beberapa kecamatan yang menggunakan nama Semarang seperti Semarang Tengah, Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Sebagai kota metropolitan dan ibukota provinsi, Semarang dilengkapi dengan berbagai fasilitas

penunjang yang memadai, termasuk pelabuhan, lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, serta kawasan bisnis dan perdagangan. Jumlah penduduk saat ini mencapai 1.739.989 jiwa yang terdiri dari 888.619 laki-laki dan 861.370 perempuan. Kota Semarang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan penting di Nusantara, menarik berbagai bangsa ke pelabuhannya. Akibatnya, kehidupan masyarakat kota ini telah dibentuk oleh percampuran budaya yang beragam, termasuk pengaruh dari Belanda, Arab Khoja, Tiongkok, dan Jawa.

Keragaman budaya menjadi daya pikat utama yang memikat minat pelancong, baik domestic maupun mancanegara. Wisatawan tertarik mengunjungi area-area bersejarah seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Arab (Kauman), dan Kawasan Pecinan, yang masing-masing mencerminkan warisan budaya yang berbeda. Patut dibanggakan adalah meskipun memiliki keragaman budaya yang kaya, warga Kota Semarang tetap mampu hidup berdampingan dalam harmoni. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah belah. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya warisan budaya Semarang, tetapi juga menjadi contoh bagaimana masyarakat multikultural dapat hidup dalam kedamaian dan saling menghormati.

Secara geografis, Kota Semarang menempati posisi geografis yang menguntungkan, lokasi wilayah ini cukup strategis jika dilihat dari jarak ke beberapa kota besar di Indonesia. Jika ditempuh melalui jalur udara, wilayah ini berjarak sekitar 558 kilometer ke arah timur dari ibu kota Jakarta. Sementara itu, jaraknya ke arah barat dari Surabaya adalah sekitar 312 kilometer. Sedangkan jika

Gambar 2. 1. Peta Kota Semarang



1. Zona pantai di bagian utara, langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Kemiringan lahan di zona ini berkisar antara 0% hingga 25%.
2. Zona dataran rendah di bagian tengah kota, kemiringan lahan antara 2% sampai 15%.
3. Zona perbukitan di bagian selatan, memiliki kemiringan lahan antara 15% hingga 40%, dengan beberapa area bahkan memiliki kemiringan lebih dari 40%.

Iklim Semarang termasuk dalam kategori tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Kota ini mengalami dua musim:

1. Musim kering berlangsung selama periode April hingga September
2. Musim basah terjadi dalam rentang waktu Oktober hingga Maret.

Kota Semarang terletak di kaki Gunung Ungaran dan merupakan bagian dari sistem hidrologi yang kompleks. Beberapa sungai besar mengalir melalui kota ini, termasuk Kali Besole, Beringin, Silandak, Siangker, Kreo, Kripik, Garang, Candi, Bajak, Kedungmundu, dan Penggaron. Sebagai daerah hilir, Semarang rentan terhadap banjir saat musim hujan karena menerima limpasan air dari sungai-sungai tersebut. Topografi kota yang berbukit dengan perbedaan ketinggian yang tajam menjadi memperburuk situasi. Akibatnya, air hujan yang turun di daerah hulu mengalir dalam waktu yang singkat ke daerah hilir.

2.2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Semarang

Kota Semarang memiliki peran ganda yang penting yaitu sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Selain itu, Semarang juga menjadi pusat administrasi kota yang membawahi 16 kecamatan. Dalam menjalankan kedua peran ini, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan efisien dan responsif.

Perkembangan pesat Kota Semarang telah membawa kepuasan bagi banyak warganya. Kota ini kini dipandang sama dengan kota-kota besar lainnya di

Indonesia. Pemerintah Kota Semarang telah meluncurkan berbagai terobosan dan inovasi yang bertujuan meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, dan kesejahteraan penduduknya. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Walikota dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk menanggapi dan bertindak cepat atas berbagai masukan dari masyarakat, termasuk saran, kritik, dan keluhan. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan warga dalam upaya terus menerus memperbaiki dan memajukan Kota Semarang. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya dan menjadikan Semarang sebagai kota yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Walikota Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab dipanggil Ita, terpilih sebagai Walikota Semarang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada tahun 2020. Ia dilantik pada awal tahun 2021 untuk masa jabatan 2021-2024. Sementara itu, untuk tingkat parlemen di Kota Semarang Parlemen Kota Semarang, yang dikenal sebagai DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), memiliki 50 anggota yang bertugas mewakili suara masyarakat kota. Para anggota ini dipilih melalui proses pemilihan umum legislatif yang diadakan di tujuh daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Mereka menjabat untuk periode 2019-2024 dengan tanggung jawab utama menyuarakan aspirasi warga Semarang. Untuk mengoptimalkan kinerja mereka, anggota DPRD Kota Semarang dibagi ke dalam empat komisi yang berbeda, masing-masing menangani bidang khusus dalam pemerintahan kota:

- 1 Komisi A: Bidang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan dan Hukum, mencakup aspek-aspek seperti tata kelola pemerintahan, keamanan publik, administrasi kependudukan, media dan informasi, legislasi, manajemen aparatur negara, perizinan, dinamika sosial-politik, organisasi kemasyarakatan, serta pertahanan
- 2 Komisi B: Bidang menangani Sektor Perekonomian, meliputi manajemen keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik daerah, pengembangan dunia usaha dan investasi, koperasi, pariwisata, perdagangan, industri, serta penyediaan pangan dan logistik.
- 3 Komisi C: Berfokus pada Bidang Pembangunan, termasuk infrastruktur umum, perencanaan kota, pertamanan, kebersihan dan pelestarian lingkungan, transportasi, perikanan dan kelautan, pertanian, serta pengelolaan sumber daya tambang dan energi.
- 4 Komisi D: Berkonsentrasi pada Kesejahteraan Rakyat, mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembinaan kepemudaan, olahraga, keagamaan, pelestarian budaya, layanan sosial, kesehatan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta program transmigrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kota Semarang tidak beroperasi secara terisolasi. Sebaliknya, pemerintah kota berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam lingkup pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Di samping lembaga teknis daerah, terdapat juga dinas-dinas

daerah yang dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Setiap dinas memiliki fokus pada bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, dan sektor-sektor lainnya. Keberadaan dinas-dinas ini dalam struktur pemerintahan memainkan peran krusial. Pemerintah Kota Semarang membantu mengurai dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan tugas pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Dengan pembagian kerja yang jelas antar dinas, pengelolaan berbagai aspek kehidupan kota menjadi lebih terorganisir dan terarah. Singkatnya, dinas-dinas daerah berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik, memastikan bahwa berbagai kebutuhan dan layanan publik dapat terpenuhi secara optimal.

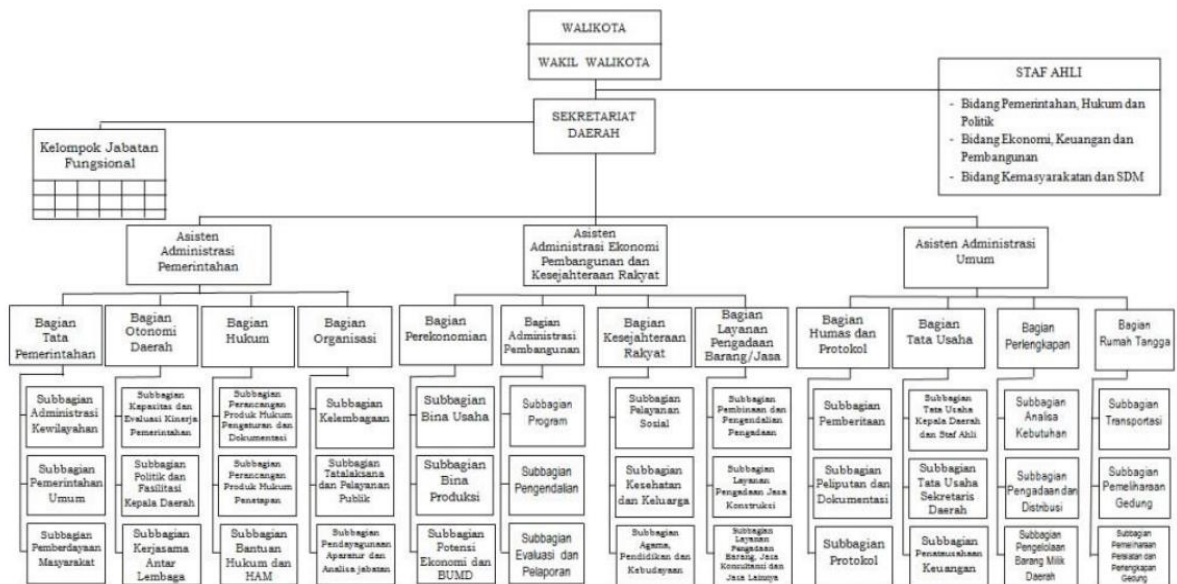
2.3. Gambaran Umum Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Kota Semarang

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja pada suatu organisasi atau instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terbagi menjadi tiga sub-unit khusus:

- a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan
- b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi;
- c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi, dan Jasa Lainnya.

Gambar 2. 2. Bagan Organisasi Pemerintah Kota Semarang



Sumber: Tata Pemerintah Kota Semarang

Bagian Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Semarang memiliki Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas dari tiga subbagian: Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan serta Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

ULP atau Unit Layanan Pengadaan merupakan komponen integral dari struktur pemerintahan yang memiliki mandat khusus dalam mengelola proses akuisisi barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Entitas ini bersifat permanen dan memiliki fleksibilitas untuk beroperasi secara mandiri atau berintegrasi dengan unit-unit yang sudah ada sebelumnya.

Tugas, wewenang, tanggung jawab ULP untuk:

1. Menyusun strategi untuk seleksi penyedia barang dan jasa.
2. Menentukan dokumen pengadaan dan besaran jaminan penawaran
3. Menyebarluaskan informasi pengadaan melalui situs web SKPD, papan pengumuman resmi, dan Portal Pengadaan Nasional via LPSE.
4. Melaksanakan evaluasi kualifikasi penyedia barang/jasa dengan metode pra- atau pascakualifikasi.
5. Menganalisis aspek administratif, teknis, dan finansial dari penawaran yang masuk.
6. Memberikan respons terhadap sanggahan yang diajukan.
7. Menunjuk penyedia barang dan jasa untuk: a) Pelelangan atau penunjukan langsung terkait pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai hingga Rp100 miliar. b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk jasa konsultasi dengan nilai hingga Rp10 miliar.
8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia ke PPKom dan mengarsipkan dokumen asli.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan terkait proses dan hasil pengadaan kepada PPKom dan/atau pejabat yang menunjuknya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan terkait proses dan hasil pengadaan kepada PPKom dan/atau pejabat yang menunjuknya.

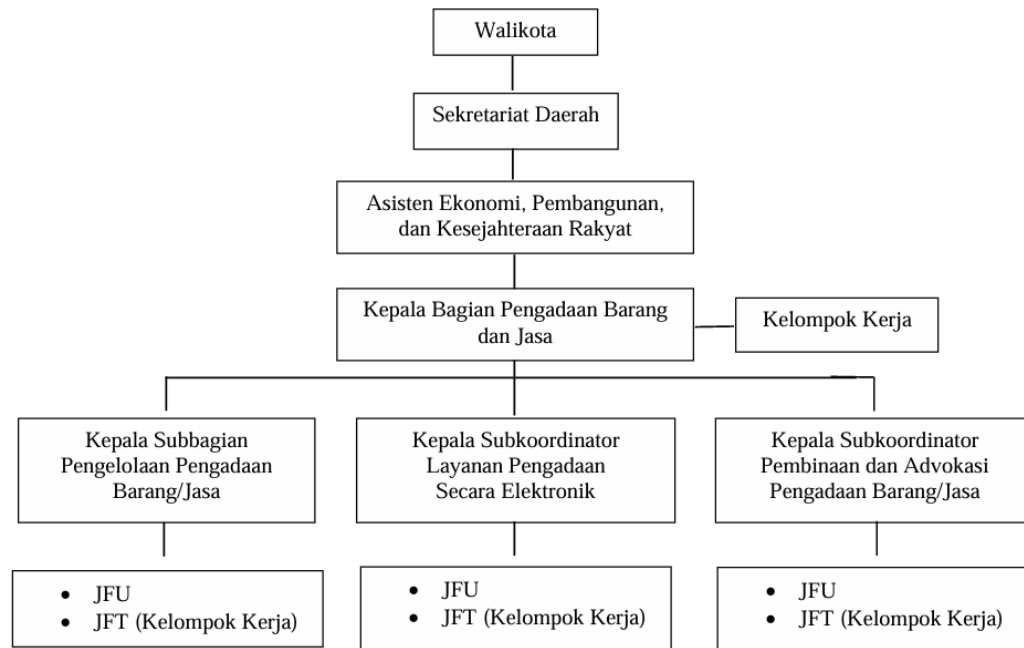
ULP memiliki struktur organisasi yang mencakup:

1. Seorang pemimpin yang disebut Kepala.

2. Bagian administrasi yang dinamakan Sekretariat.
3. Tim pendukung yang terdiri dari Staf pendukung.
4. Empat kelompok kerja khusus, yaitu:
 - a. Kelompok kerja yang menangani Pengadaan Barang.
 - b. Kelompok kerja yang bertanggung jawab atas Pekerjaan Konstruksi.
 - c. Kelompok kerja yang mengelola Jasa Konsultansi.
 - d. Kelompok kerja yang mengurus Jasa Lainnya.

Struktur ini menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam ULP, mulai dari kepemimpinan hingga tim-tim yang menangani berbagai aspek pengadaan. Susunan ini memungkinkan ULP untuk mengelola berbagai jenis pengadaan secara efektif dan terorganisir.

Gambar 2. 3. Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kota Semarang



Sumber: Tata Pemerintahan Kota Semarang